

THE POLITICAL IMPACT OF PRESIDENT SOEHARTO'S SPEECH AT THE ABRI LEADERSHIP MEETING ON 27 MARCH 1980

Dampak Politik Pidato Presiden Soeharto pada Rapat Pimpinan ABRI 27 Maret 1980

Ipong Jazimah^{1a*}, Arifin Suryo Nugroho^{2b}, Dhalia Soetopo^{3c}, Intan Permana Sari^{4d}

¹²⁴Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kembaran, Banyumas 53182, Indonesia

³Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi, 68416, Indonesia

^aipongjazimah@ump.ac.id

^barifinsuryonugroho@ump.ac.id

^cdhalia.soetopo@gmail.com

^dintanpermanasari79@gmail.com

(* Corresponding Author

^aipongjazimah@ump.ac.id

How to Cite: Jazimah, Nugroho, Soetopo, Sari. (2026). The Political Impact of President Soeharto's Speech at the ABRI Leadership Meeting on 27 March 1980 doi: 10.36526/js.v3i2.7014

Received : 10-10-2025

Revised : 25-11-2025

Accepted : 28-12-2025

Keywords:

Presidential speech,
Suharto,
New Order politics,
ABRI

Abstract

This research is entitled "The Political Impact of President Soeharto's Speech at the ABRI Leadership Meeting on 27 March 1980." The president's speech at the ABRI Leadership Meeting was used by Soeharto to carry out political control and civil repression against his political opponents. The objectives of this research are: 1) to describe the political situation in Indonesia in the 1980s, 2) to examine the content of President Soeharto's speech delivered on 27 March 1980, and 3) to analyze the political impacts arising from President Soeharto's speech on 27 March 1980. This research is a historical study and employs heuristics, source criticism (verification), external and internal criticism, interpretation, and presentation (historiography). The results of this research indicate that public trust in the government began to decline in 1980. President Soeharto's speech on 27 March 1980 represented an attempt to attack his political opponents. The address also signaled that the Indonesian Armed Forces (ABRI) and Pespri (Indonesian National Armed Forces) should support Golkar in the election. The speech provoked strong opposition from various elements of society; the most vocal critics were the Petition 50 Group, which issued a Statement of Concern criticizing President Soeharto.

PENDAHULUAN

Kurun waktu tahun 1980-an sebuah peristiwa terjadi di jagad perpolitikan Indonesia. Tepatnya 13 Mei 1980, tokoh-tokoh penting tanah air seperti mantan pejabat tinggi negara baik sipil maupun militer, melancarkan protes kepada DPR. Bukan protes biasa, karena protes itu ditujukan untuk kepala negara yang saat itu dijabat oleh Soeharto. Di antara tokoh yang protes ada A.H. Nasution, Ali Sadikin, Sjafroeddin Prawiranegara, Hoegeng Imam Santoso, M. Jasin, Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Anwar Harjono, Azis Saleh, A.J. Mokoginta, A.M. Fatwa dan lain-lainnya (Tim Penulis YLKB, 1991). Mereka dengan berani mengkritik dan mempertanyakan kembali pidato Presiden Soeharto pada Rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980. Tidak hanya itu, mereka juga berani menyoroti pidato Presiden Soeharto pada HUT Kopassandha di Cijantung 16 April 1980.

Mereka kecewa atas pidato Presiden Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung yang dinilai telah menafsirkan Pancasila secara keliru. Bagi mereka, Presiden Soeharto menggunakan ideologi

negara untuk menyerang lawan-lawan politiknya (Jenkins, 2010). Selain itu mereka juga kecewa pada pernyataan Presiden Soeharto yang meminta agar ABRI berpihak pada salah satu partai dan memilih kawan atau lawan atas dasar penilaian sepihak darinya ("Amanat Tambahan Presiden ...," 1980). Pidato Presiden Soeharto itu seolah-olah untuk menegaskan, siapa saja yang menjadi lawan politiknya adalah golongan anti Pancasila. Belum lagi munculnya sebutan bernada negatif seperti "tidak Pancasila" atau "Pancasila plus" yang diarahkan kepada kelompok yang berseberangan politik dengannya ("Ucapan Presiden Merupakan Peringatan," 1980).

Kritik yang termaktub dalam surat bernama Pernyataan Keprihatinan yang kemudian lebih dikenal dengan Petisi 50 karena ditandatangani 50 orang itu dilanjutkan DPR dengan dikirimnya pertanyaan kepada Presiden Soeharto oleh 19 anggota DPR. Sangat disayangkan jawaban Presiden Soeharto tidak memuaskan 19 anggota DPR yang mengajukan pertanyaan, begitu juga tidak memuaskan Kelompok Petisi 50. Nyatanya, karena dianggap meresahkan dan mengganggu ketenangan pemerintah, Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo bersama dengan Kepala Bakin Jenderal Yoga Sugama dan Jaksa Agung Ali Said berinisiatif untuk menahan dan memenjarakan penandatangan Petisi 50. Namun keinginan itu ditolak dan tidak direstui oleh Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf. Masalah tidak selesai sampai disini, karena secara diam-diam penandatangan Petisi 50 dikenai kematian sipil, isolasi, sampai pencekalan. Tanpa surat, tanpa keputusan pengadilan, semua diberlakukan hanya dengan kode "ada perintah dari atas".

Penelitian ini berusaha menghadirkan kembali secara kronologis peristiwa keluarnya pidato Presiden Soeharto yang menyebabkan gejolak politik yang begitu kuat dan menyita perhatian masyarakat Indonesia. Apa yang mereka lakukan merupakan bentuk dari *moral force*. Petisi 50 bukanlah peristiwa yang tiba-tiba namun akumulasi dari perjalanan militer di masa lalu dan peristiwa-peristiwa politik sebelumnya (Jazimah, n.d.; Nugroho, 2025). (Jazimah, 2013). Kritik yang disampaikan oleh para mantan perwira tinggi ABRI yang tergabung dalam Fosko pada tahun 1978, aksi *walk out* yang dilakukan oleh PPP dari unsur NU saat Sidang Umum MPR 1978 membahas P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan aksi *walk out* kembali saat DPR sidang membahas RUU Pemilihan Umum 1982 (Hakim, 1993). Kritik yang bertubi-tubi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi suara Golkar dalam Pemilihan Umum 1982 sehingga Presiden Soeharto melakukan serangan balasan dengan memanfaatkan pidato kepresidenan.

Penelitian ini menggambarkan secara kronologis situasi politik tahun 1980, isi pidato Presiden Soeharto pada rapat pimpinan ABRI dan dampaknya. Penelitian ini sekaligus melengkapi informasi tentang dunia politik era orde baru yang tidak bebas dan terikat oleh kepentingan pemerintah dan kontrol politik yang dilakukan oleh Soeharto melalui ABRI sebagai alat politiknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan studi pustaka yang terdiri atas 5 tahap yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (*heuristik*), kritik sumber (*verifikasi*), interpretasi dan penyajian atau *historiografi* (Priyadi, 2021). Sumber primer yang peneliti dapatkan berupa surat kabar sejaman diantaranya Kompas, Tempo, Berita Buana, Pelita dan Dewan Masyarakat. Sumber sekunder adalah buku-buku ataupun artikel yang ditulis oleh sejarawan. Peneliti melakukan *kritik intern* dengan menyelidik isi berita, sumber berita, narasumber berita, hingga kredibilitas surat kabar. Surat kabar Tempo dan Kompas dikenal memiliki kredibilitas yang cukup dipercaya. Buku karya David Jenkins dan buku karangan Lukman Hakim serta Ramadhan K.H. dijadikan pembanding dalam interpretasi dengan data-data yang diperoleh dari sumber surat kabar sejaman ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan dampak politik pidato Presiden Soeharto pada 27 Maret 1980.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Politik di Indonesia Tahun 1980

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidato resmi seorang presiden di hadapan perwira tinggi ABRI tidak hanya untuk formalitas sebagai kepala negara untuk menyampaikan pikiran tapi juga digunakan untuk melegitimasi kekuasaan dengan cara mengontrol lawan politik melalui kekuatan ABRI. Masa Orde Baru, pemerintahan memang dikuasai oleh militer. Kalangan perwira tinggi ABRI di masa Orde Baru terpecah menjadi 2 kelompok yaitu pertama, mereka yang setuju ABRI mendukung Golkar dan kelompok kedua, mereka yang tidak setuju dengan itu. Kelompok kedua menjelma menjadi pengkritik pemerintah yang aktif. Akibatnya mereka sering disingkirkan bahkan dimusuhi oleh pemerintah. Tak jarang mereka adalah senior atau justru teman Soeharto seangkatan di ABRI. Saat wadah berkumpulnya para purnawirawan ABRI yaitu Pepabri (Persatuan Purnawirawan ABRI) diharuskan mendukung Golkar, kelompok kedua jelas melawan. Bagi mereka, semua purnawirawan ABRI berhak untuk menentukan sendiri arah politiknya masing-masing, apakah akan bergabung dengan Golkar atau dengan partai lain. Umumnya mereka yang melawan menghendaki Pepabri bebas dari unsur-unsur politik kekuasaan.

Masa pemerintahan Soeharto menyederhanakan partai sehingga hanya ada tiga partai yang dibolehkan pemerintah pertama PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang merupakan fusi dari berbagai partai seperti Partai NU (Nahdatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), dan Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia). Kedua, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang merupakan fusi dari berbagai partai seperti PNI, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak). Ketiga, Golkar (Golongan Karya) yang terdiri dari berbagai macam organisasi profesi. Di kursi DPR, adanya dwi fungsi ABRI membuat ABRI mendapatkan jatah kursi yang dalam pelaksanaannya mendukung Golkar.

Gejolak itu semakin menimbulkan rasa tidak puas di kalangan beberapa mantan perwira tinggi ABRI. Pepabri dinilai terlalu berorientasi ke politik terutama keharusan untuk mendukung Golkar dalam pemilu. Salah satu tokoh yang tidak setuju dengan Pepabri yang bertujuan untuk mendukung Golkar adalah R. Soedirman mantan Pangdam Brawijaya. Ia memilih keluar dari Pepabri ketika ada keharusan semua anggota Pepabri harus menjadi anggota Golkar. Nama lainnya adalah Ali Sadikin. Menurut Ali Sadikin Pepabri seharusnya hanyalah lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan purnawirawan ABRI saja tidak lebih ("Lahirnya Petisi 50," 1994). Dari gejolak ini muncullah keinginan untuk mendirikan suatu forum yang lebih terbuka dan independen. Forum yang menjadi ajang diskusi masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan juga hukum. Suatu forum yang bersifat bebas dan tidak terikat kepada Golkar. Tempat dimana para purnawirawan ABRI dapat menampung pemikiran-pemikiran mereka tentang berbagai persoalan bangsa.

Sementara itu tokoh-tokoh mantan perwira tinggi dari tiga divisi yaitu Brawijaya, Siliwangi, dan Diponegoro yang kemudian populer disebut Kelompok Brasildi kerap berkumpul secara informal membicarakan keadaan dan berbagai persoalan bangsa. Dari Divisi Brawijaya diwakili oleh G.P.H. Djatikoesoemo, R. Soedirman, dan M. Jasin. Divisi Siliwangi diwakili Kemal Idris, A.J. Mokoginta, Achmad Soekendro, Daan Jahja, dan A. Kawilarang. Divisi Diponegoro diwakili oleh Munadi, Brotosewoyo, dan Iskandar Ranuwihardjo ("Bukan Kelompok Sehidup Semati," 1991). Mereka aktif berkumpul pada kurun pertengahan 1977 sampai awal 1978. Namun karena bersifat nonformal, mereka kesulitan untuk mengajukan saran atau kritik kepada pemerintah. Melihat kondisi ini semakin kuatlah desakan untuk mendirikan forum yang terbuka namun bersifat formal di kalangan mantan militer.

Pada 14 Desember 1977 Menhankam/Pangab Jenderal M. Panggabean menggagas forum komunikasi bagi purnawirawan ABRI. Ia menyerahkan pembentukannya pada Pepabri namun nyatanya tidak terealisasi. Brasildi kemudian bergerak dengan menggandeng Pangkoptantib yang saat itu diwakili oleh wakil Pangkoptantib yaitu Laksamana Soedomo, membentuk forum komunikasi bernama Brasildi Plus dengan melibatkan mantan perwira dari luar Jawa. Brasildi Plus

mendapat sambutan baik dari Kasad Jenderal Widodo yang baru saja dilantik. Dari Brasildi Plus inilah akhirnya pada 12 April 1978 diresmikan sebuah forum komunikasi purnawirawan ABRI oleh Kasad Jenderal Widodo dengan SK No. 060/YKEP/1978 bernama Fosko TNI-AD (Forum Studi dan Komunikasi TNI-AD).

Fosko menjadi sub organisasi Yayasan Kartika Eka Paksi, yayasan milik AD yang beranggotakan semua mantan Kasad. Fosko berkembang dengan memberikan masukan-masukan mereka kepada pemerintah seperti saran tentang kembalinya pemerintahan kearah yang lebih demokratis dan mengembalikan peran ABRI. Anggota-anggota Fosko terdiri dari mantan petinggi militer. Selain itu perwira senior aktif berpangkat tinggi juga menyatakan dukungan mereka terhadap Fosko.

Dengan cepat Kasad Jenderal Widodo melaporkan berdirinya Fosko dan perkembangannya kepada Menhankam/Pangab yang baru yaitu Jenderal M. Jusuf. Nampak bahwa Kasad Jenderal Widodo sangat mendukung penuh adanya Fosko bahkan ia merasa tugasnya terbantu karenanya. Sebagai lembaga sah di bawah Kasad, Fosko pun menyusun struktur organisasinya untuk memudahkan dalam bekerja. Bertindak sebagai presidium Fosko adalah G.P.H. Djatikoesoemo, R. Soedirman, dan Achmad Soekendro. Nama-nama lainnya yang juga ada dalam Fosko antara lain seperti H.R. Dharsono, A.J. Mokoginta, Daan Jahja, M. Jasin, Sugih Arto, dan A. Kawilarang (Jenkins, 2010).

Fosko inilah yang nantinya membidani lahirnya pengkritik tajam pemerintahan Soeharto. Mereka yang aktif mengkritik Soeharto dalam Fosko bukanlah orang sembarangan, semuanya mempunyai karier yang cemerlang di militer. Contohnya G.P.H. Djatikoesoemo adalah mantan Kasad, R. Soedirman adalah mantan Pangdam Brawijaya, M. Jasin pernah menjadi Pangdam Brawijaya dan Wakil Kasad, sementara Daan Jahja dan Alex Kawilarang adalah mantan Pangdam Siliwangi. Melihat bahwa anggota Fosko dulunya adalah bagian dari pemerintahan militer ala Soeharto itu sendiri, sehingga bukan suatu yang mengejutkan bila kemudian keberadaan Fosko tidak disukai oleh perwira tinggi militer yang masih aktif dan menjabat di pemerintahan. Kritik-kritik yang disampaikan Fosko dirasa sangat mengganggu pemerintah. Dari sinilah nampak bahwa sesungguhnya hubungan antara Fosko dan pemerintah mulai tidak mesra.

Setelah diresmikan, Fosko aktif mengadakan rapat di kantor Yayasan Kartika Eka Paksi di lantai dasar Gedung Graha Purna Yudha. Rapat seminggu sekali itu secara bergantian dipimpin oleh anggota presidium Fosko. Komunikasi dan diskusi yang dilakukan secara aktif dan teratur oleh Fosko berhasil melahirkan lima memorandum yang berisi koreksi terhadap pemerintah Orde Baru yang kemudian mereka serahkan kepada Kasad Jenderal Widodo (Bratanata, 1991). Anggota Fosko memang menilai bahwa pemerintahan Soeharto sudah mulai kebablasan dan melakukan beberapa kesalahan serta tidak lagi sesuai dengan cita-cita awal Orde Baru sehingga perlu dikoreksi.

Isi Pidato Presiden Soeharto pada 27 Maret 1980

Kamis pagi 27 Maret 1980 di Gedung Dang Merdu Pekanbaru, Presiden Soeharto secara resmi membuka Rapim ABRI. Agenda di Pekanbaru itu dilakukan setelah kunjungan presiden ke Kuantan Malaysia menemui Perdana Menteri Datuk Hussein. Setahun sebelumnya Rapim ABRI digelar di Timor-Timur dan sesuai rencana, tahun-tahun berikutnya akan bergilir di setiap daerah. Rapim ABRI menjadi agenda wajib tahunan ABRI untuk menentukan kebijakan-kebijakan baru mereka.

Pada pidato resmi dengan naskah, Presiden Soeharto banyak menaruh wejangan kepada ABRI. Ia meminta agar ABRI kuat dan tangguh dalam melaksanakan dwi fungsinya. Di depan pejabat-pejabat tinggi militer, Presiden Soeharto menyatakan bahwa ABRI selain sebagai kekuatan pertahanan keamanan juga sebagai kekuatan sosial-politik. Ia juga meminta dukungan yang penuh dari ABRI untuk menjaga Pancasila. Selain itu Presiden Soeharto juga menyinggung mengenai Operasi Bakti yang disebutnya sebagai pengabdian ABRI untuk rakyat ("Presiden Suharto: ABRI Agar ...," 1980).

Tidak hanya Presiden Soeharto, Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf juga ikut menambahkan mengenai perwujudan kemandirian ABRI dengan rakyat sebagai inti kekuatan

persatuan dan kesatuan nasional. Tanpa disangka, Jenderal M. Jusuf menyinggung dalam pidatonya itu bahwa ABRI akan berdiri di atas semua golongan. Kata-kata Jenderal M. Jusuf ini diperkirakan menjadi salah satu pemantik kemarahan Soeharto kepada Jenderal M. Jusuf. Karena itu setelah selesai membacakan pidato resmi dengan naskah, Soeharto kembali naik ke podium untuk memberikan pidato kembali. Kali ini pidatonya tanpa naskah. Pidato tanpa naskah inilah yang kemudian lebih banyak menjadi sorotan dan berakhir sebagai polemik. Pidato tanpa naskah yang dilakukan Soeharto dianggap dapat menyebabkan pertentangan di antara masyarakat karena adanya sinyal mengganti makna Pancasila yang sesungguhnya.

David Jenkins menyebut ada dua sebab mengapa Soeharto berpidato tanpa naskah sedemikian kerasnya pada Rapim ABRI Pekanbaru (Jenkins, 2010). Pertama, Soeharto benar-benar marah atas tindakan Fraksi Persatuan Pembangunan unsur NU yang melakukan *walk out* sewaktu sidang membahas P4 dan RUU Pemilihan Umum. Kedua, Soeharto marah dengan pidato Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf yang mengatakan dalam pidatonya bahwa ABRI akan berdiri di atas semua golongan, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Soeharto. Selain itu pemicu lainnya ialah banyaknya kritik yang ditujukan kepada Soeharto sebelum ia berangkat ke Pekanbaru, termasuk kritik-kritik tajam dari Fosko.

Ada beberapa point penting yang ditegaskan Soeharto dalam pidato tanpa naskahnya. Pertama, menurut Soeharto terdapat partai politik atau kelompok yang belum mempercayai Pancasila sepenuhnya. Ia menganggap ideologi Pancasila tenggelam oleh paham-paham lainnya dan paham-paham itu dapat menyebabkan suatu pemberontakan. Secara mengejutkan Presiden Soeharto menyebutkan sosialisme, marhaenisme, nasionalisme, dan agama dalam daftar ideologi yang tidak dikehendaki pemerintah. Pemerintah ingin mengadakan koreksi terhadap paham-paham yang dianggap tidak sesuai Pancasila itu ("Amanat Tambahan Presiden ...," 1980).

Kedua, Soeharto menganggap perbedaan azas sebuah partai politik dengan pemerintah adalah bentuk keragu-raguan terhadap Pancasila. Hal ini dicontohkannya dengan sikap *walk out* saat sidang MPR membahas mengenai P4. Sikap *walk out* kembali diulang saat DPR mengadakan sidang menyelesaikan pembahasan RUU Pemilihan Umum. Walaupun Soeharto tidak menyebut nama, mudah ditebak kepada siapa kata-katanya ditujukan, karena saat itu hanya Fraksi Persatuan Pembangunan dari unsur NU yang melakukan *walk out*.

Ketiga, Soeharto menyinggung tentang makna kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia dan mengenai perubahan UU. Ia mengkhawatirkan pihak-pihak tertentu –walaupun ia tidak menyebut siapa yang dimaksudnya- merubah UU sehingga tidak lagi sesuai dengan yang diharapkannya. Kali ini Soeharto juga menyindir pihak-pihak yang menentang terpilihnya ia kembali sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya. Saat itu santer mengemuka kritik mengenai kekuasaan presiden yang seharusnya dibatasi hanya dua kali masa jabatan, namun permintaan ini tak di gubris. Seolah Soeharto menegaskan bahwa pemilihan presiden adalah menjadi tugas DPR/MPR. Apakah calon itu akan dipilih kembali untuk yang kesekian kali tidak menjadi soal.

Keempat, Soeharto menggunakan ABRI sebagai alat untuk menjaga eksistensi kekuasaannya. ABRI bukan lagi komponen negara tapi sudah menjadi alat politiknya. Ia meminta ABRI menjaga agar tidak ada perubahan Undang-Undang. Perintah ini merujuk pada perubahan sistem pemilihan presiden dan masa kekuasaannya juga perubahan UU Pemilihan Umum yang selama ini kuat disuarakan oleh PPP dan PDI.

Kelima, Soeharto menyatakan bahwa bila perlu ABRI akan mengangkat senjata untuk mempertahankan agar tidak terjadi perubahan. Kalimat ini mengacu pada petunjuk agar ABRI mengangkat senjata untuk melawan pihak-pihak yang berusaha mengadakan perubahan. Secara tersirat Soeharto meminta ABRI agar memastikan tidak ada perubahan dalam tata peraturan pemerintahan dan perpolitikan yang sekiranya dapat mengganggu stabilitas kekuasaannya. Cara itu bahkan bisa ditempuh dengan mengangkat senjata, karena presiden sudah menghalalkannya.

Keenam, pada salah satu kalimat pidatonya yang tanpa teks itu Soeharto menyatakan bahwa daripada mengangkat senjata lebih baik menculik salah satu anggota MPR sehingga syarat 2/3 agar perubahan UU bisa terlaksana, tidak terpenuhi. Ini adalah sinyal Soeharto kepada ABRI agar

“mengamankan” siapa saja anggota DPR/MPR yang hendak berseberangan dengan dirinya. Ketujuh, Soeharto menginginkan ada penyederhanaan partai politik dan penyatuan azas serta ideologi bagi semua partai politik dan kelompok.

Kedelapan, Soeharto mengingatkan ABRI untuk hati-hati dalam memilih partner, kawan dan teman. Kata-kata Presiden Soeharto ini menjadi sinyal agar ABRI mendukung Golkar dalam pemilu 1982. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf, Kasad Jenderal Widodo dan apa yang sudah ditulis dalam Makalah Seskoad maupun Makalah Widodo bahwa ABRI akan berdiri di atas semua golongan.

Kesembilan, dengan mencontohkan dirinya sendiri, Soeharto meminta agar semua purnawirawan ABRI masuk ke Pepabri dan mendukung Golkar. Kalimat ini juga menjadi kontroversial karena pensiunan ABRI mempunyai hak untuk berpolitik sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mereka akan bergabung kepada partai apa adalah pilihan masing-masing orang. Pidato yang disampaikan tanpa naskah ini meninggalkan banyak pertanyaan sekaligus kekecewaan. Kelompok-kelompok yang dituding oleh Soeharto, merasa kecewa dengan pernyataan presiden karena apa yang mereka lakukan dalam Sidang Umum MPR adalah bentuk demokrasi dan dilindungi Undang-Undang. Selain itu apa yang disampaikan presiden jelas bertolak belakang dengan apa yang tercantum dalam Makalah Seskoad, Makalah Widodo juga kata-kata Jenderal M. Jusuf bahwa ABRI berdiri di atas semua golongan. Pidato ini semakin meyakinkan kalangan pengkritik pemerintah bahwa Soeharto menginginkan keseragaman politik dan bahwa ABRI mendukung Golkar adalah mutlak tidak bisa dibantah. ABRI benar-benar menjelma menjadi kekuatan politik Golkar, tidak lagi sebagai kekuatan negara.

Dampak Politik Pidato Presiden Soeharto pada 27 Maret 1980

Pidato Presiden Soeharto di Rapim ABRI Pekanbaru memancing reaksi dari berbagai tokoh termasuk tokoh ABRI, Fosko yang kemudian berubah nama menjadi FKS, dan YLKB (Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi), lembaga bentukan Nasution dan Hatta pada 1978. Dari kalangan ABRI, reaksi pertama muncul dari Gubernur Lemhanas Letjen Sutopo Juwono yang segera menemui Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf. Letjen Sutopo Juwono menanyakan kepada Jenderal M. Jusuf apakah pidato Presiden Soeharto mencerminkan sikap ABRI. Jenderal M. Jusuf menolak dan menyatakan bahwa pidato tersebut mewakili pikiran yang berkembang di ABRI. Menurut Jenderal M. Jusuf pidato itu tidak sejalan dengan pidato presiden pada HUT ABRI 5 Oktober 1979 yang menegaskan bahwa ABRI berdiri di atas semua golongan (Jenkins, 2010).

Reaksi berikutnya datang dari anggota FKS A.J. Mokoginta yang membuat surat atas nama pribadi kepada Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf pada 18 April 1980. Dalam surat pribadinya yang terdiri dari sembilan halaman itulah Mokoginta mempertanyakan pidato Soeharto di Rapim ABRI. Dalam suratnya Mokoginta mengungkapkan keprihatinannya atas ucapan-ucapan Presiden Soeharto di Rapim ABRI khususnya yang menyangkut masalah ideologi dan peranan politik ABRI, termasuk masalah ABRI yang sudah pensiun diharuskan masuk Golkar. Sementara bagi Golkar sendiri, pidato Presiden Soeharto dianggap sebagai sebuah peringatan keras. Seperti yang diungkap oleh anggota Dewan Pertimbangan Golkar DKI Jakarta Moh. Kaharuddin. Ia mengatakan apa yang dikemukakan Presiden Soeharto di Rapim ABRI Pekanbaru adalah peringatan bagi semua pemimpin Orde Baru agar lebih berhati-hati terhadap segala ancaman yang tiba-tiba datang (“Ucapan Presiden Merupakan Peringatan,” 1980). Pihak Golkar jelas mendukung dan membenarkan pidato Soeharto.

Setelah Mokoginta mengirimkan surat kepada Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf, FKS juga bereaksi dengan mengirim surat pada 2 Mei 1980 ke Kasad yang baru yaitu Jenderal Poniman dengan tembusan ke Menhankam/Pangab. Surat FKS itu ditandatangani oleh R. Soedirman dan H.R. Dharsono. Bila surat Mokoginta menanggapi pidato Soeharto di Rapim ABRI Pekanbaru, surat dari FKS ini sekaligus menanggapi pidato Soeharto di HUT Kopassandha.

Perihal surat protes terhadap pidato Presiden Soeharto yang dikirimkan oleh Gubernur Lemhanas, Mokoginta dan FKS ke Menhankam/Pangab maupun Kasad, memperlihatkan bahwa kontra pidato presiden seolah-olah berkulat di sekitar internal ABRI. Namun sebenarnya di luar ABRI kegelisahan yang sama juga mulai mengemuka. Mohammad Natsir yang saat itu sedang di Turki

juga memprihatinkan pidato-pidato Presiden Soeharto. Natsir yang menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia memang sedang memimpin sidang membahas konflik etnis Yunani dan Turki. Begitu mendengar pidato Soeharto yang cukup kontroversial itu, ia jatuh sakit karena terlalu memikirkan persoalan tanah air ("Berpetisi Tanpa Caci Maki," 2008).

Tiga surat yang mempertanyakan pidato Presiden Soeharto kepada Menhankam/Pangab dan Kasad, tidak mendapat respon positif dari pemerintah. Justru sebaliknya, respon negatif yang datang yaitu pemutusan hubungan antara pemerintah dengan FKS. Merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai, apalagi surat hanya ditujukan kepada pimpinan ABRI. Tokoh-tokoh dari FKS dan YLKB kemudian menginginkan surat protes dilayangkan ke DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi presiden.

Atas inisiatif FKS, diadakanlah pertemuan di Gedung Veteran atau Gedung Graha Purna Yudha. Bertempat di kantor FKS itulah, FKS mengumpulkan tokoh-tokoh yang berasal dari FKS sendiri, tokoh YLKB, tokoh Islam dan tokoh penting lainnya untuk menindaklanjuti surat protes yang mereka kirimkan kepada Kasad dan Menhankam/Pangab. Adanya kesamaan misi antara FKS, YLKB, dan tokoh-tokoh Islam itulah akhirnya pertemuan yang digawangi FKS itu dapat terlaksana juga. Menurut A.M. Fatwa, undangan FKS kepada kalangan Islam disalurkan melalui H.M. Sanusi. Selain A.M. Fatwa, tokoh Islam lainnya yang ada dalam pertemuan itu adalah Burhanuddin Harahap, Anwar Harjono, dan Radjab Ranggasoli.

Dua kali pertemuan yang dilaksanakan di gedung Graha Purna Yudha telah menghasilkan surat protes yang akan dikirim ke DPR. Surat protes yang bernama Pernyataan Keprihatinan itu menjadi jalan bagi tokoh-tokoh FKS, YLKB, dan tokoh Islam lainnya untuk bertanya mengenai pidato Presiden Soeharto di Rapim ABRI Pekanbaru dan HUT Kopassandha Cijantung. Untuk mendapatkan tambahan tandatangan dukungan, Pernyataan Keprihatinan itu kemudian dibawa dari satu rumah tokoh nasional ke rumah tokoh nasional lainnya ("Lahirnya Petisi 50," 1994).

Pernyataan Keprihatinan dibuat untuk menyampaikan sebuah kritik kepada Soeharto bahwa pidatonya di Rapim ABRI Pekanbaru dan HUT Kopassandha Cijantung menyebabkan polarisasi. Seolah-olah ada masalah antara mereka yang mempertahankan Pancasila dan mereka yang ingin mengganti Pancasila. Walaupun sebenarnya tidak ada sama sekali upaya untuk mengganti Pancasila. Kritik yang selama ini ditujukan kepada pemerintah semata-mata untuk mengingatkan agar tidak lupa pada cita-cita Orde Baru yang sebenarnya seperti ketika pertama kali Orde Baru dibangun. Begitu pula sikap *walk out* yang dilakukan sebagian anggota DPR adalah bentuk ketidaksetujuan saja.

Pernyataan Keprihatinan juga keras menyuarakan bahwa Soeharto dianggap telah keliru menafsirkan Pancasila. Pancasila dipakai sebagai alat untuk menyerang lawan-lawan politiknya yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, padahal Pancasila dilahirkan untuk mempersatukan bangsa. Selain itu Soeharto juga mengajak ABRI untuk berpihak pada salah satu golongan saja dan memilih kawan serta lawan berdasarkan penilaian sepihak dari penguasa.

Pernyataan Keprihatinan merupakan bentuk kepedulian beberapa tokoh terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang sudah tidak lagi sejalan dengan semangat pendirian Orde Baru. Mereka ingin kesalahan-kesalahan pelaksanaan itu diluruskan sehingga generasi Indonesia seterusnya tidak salah dalam memaknai dasar negaranya ("Pembangunan Fisik Ada, Politik Tidak," 1981). Nasution juga menggarisbawahi bahwa tujuan dikeluarkannya Pernyataan Keprihatinan adalah upaya pembenahan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia yang sifatnya meluas. Penandatanganan Pernyataan Keprihatinan adalah tokoh-tokoh penting dari FKS, YLKB, dan tokoh-tokoh lainnya yang peduli terhadap perjuangan untuk memurnikan Pancasila dan UUD 1945. Rata-rata adalah mantan pejabat baik dari masa Soekarno maupun Soeharto. Beberapa juga tercatat tokoh partai politik, pengusaha, pengacara, dan anggota sebuah organisasi.

Penandatanganan Pernyataan Keprihatinan menyebut bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bentuk dari *moral force*. Mereka tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar, sehingga teras janggal bahwa kemudian pemerintah justru menilai tindakan mereka sebagai usaha untuk melawan pemerintah apalagi nanti sampai kepada tuduhan melakukan kudeta. Mereka yang

memilih untuk bergabung dengan Petisi 50 menganggap hal itu sebagai wujud perjuangan untuk bangsa Indonesia dengan mengingatkan pemerintah Orde Baru yang dinilai mulai menyimpang ("Kecewa Terhadap Pelaksanaan Orba," 1994).

Pernyataan Keprihatinan pada perkembangannya kemudian lebih dikenal sebagai Petisi 50 karena ditandatangani oleh 50 orang. Nama Petisi 50 diberikan oleh Ali Moertopo, mengacu pada Petisi 26 yang sebelumnya telah lahir. Karena ingin menempuh jalan legal konstitusional, Petisi 50 perlu wadah yang legal juga. FKS sebagai inisiator, sedari awal memutuskan untuk tidak ikut campur pengiriman surat ke DPR karena mereka adalah lembaga yang berada di bawah Kasad. Akhirnya disepakati bahwa YLKB akan menjadi lembaga yang mewadahi Petisi 50 mengingat YLKB adalah lembaga sah dan resmi menurut hukum. YLKB di bawah pimpinan Azis Saleh kemudian membuat surat permintaan dialog ke DPR dengan melampirkan Pernyataan Keprihatinan itu. DPR dianggap sebagai lembaga yang paling tepat untuk menanyakan perihal pidato presiden langsung kepada presiden sendiri.

Pada 13 Mei 1980 Pernyataan Keprihatinan secara resmi dibawa ke DPR dibawah koordinasi Azis Saleh yang sekaligus merupakan ketua YLKB. Selain Azis Saleh ada nama lain yang ikut ke DPR diantaranya Soeyitno Soekirno, Ali Sadikin, Mohammad Natsir, A.J. Mokoginta, Slamet Bratanata, H.M. Sanusi, Chris Sinar Key Timu, A.M. Fatwa, dan Anwar Harjono. Delegasi Petisi 50 ini diterima oleh pimpinan DPR dengan sangat baik.

Setelah bertemu ketua DPR/MPR, kemudian secara berturut-turut delegasi Petisi 50 bertemu dan berdiskusi dengan Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrasi Indonesia, Fraksi Karya Pembangunan, dan Fraksi ABRI. Pertemuan berlangsung selama 4 hari yaitu sejak 13-16 Mei 1980. Kesimpulan dari pertemuan itu adalah bahwa delegasi Petisi 50 meminta agar DPR menanyakan kepada presiden apa maksud dari pidatonya di Rapim ABRI Pekanbaru dan HUT Kopassandha Cijantung. Beberapa anggota DPR terutama dari Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut baik apa yang menjadi permintaan YLKB dan mereka akan menindaklanjuti dengan mengajukan pertanyaan kepada presiden.

Satu jam setelah Petisi 50 disampaikan kepada pimpinan DPR, Pangkopkamtib Laksamana Soedomo segera menelepon semua pemimpin redaksi media massa dan elektronik. Laksamana Soedomo menginstruksikan jajaran media massa untuk tidak menyiarkan Petisi 50 dan Dokumen Jasir. Namun instruksi tersebut gagal karena persebaran dokumen sudah tidak dapat dikendalikan. Begitu instruksinya gagal menghambat persebaran dokumen Petisi 50 dan Dokumen Jasir, Laksamana Soedomo bersama Kepala Bakin Jenderal Yoga Sugama bergerak cepat. Keduanya kemudian memanggil redaktur surat kabar dan majalah pada 3 Juni 1980.

Menurut pemerintah, tindakan Petisi 50 dengan Pernyataan Keprihatinan yang mengkritik pidato Presiden Soeharto dianggap sebagai bentuk fitnah kepada kepala negara. Nasution sendiri tidak setuju dengan tuduhan memfitnah yang dialamatkan kepada Petisi 50. "Kita disebut memfitnah presiden. Tapi dalam soal apa? Tidak pernah dari dulu diberitahukan. Terakhir, kita oleh Soedomo diharuskan minta maaf kepada Pak Harto karena sudah memfitnah. Lalu juga oleh Soedharmono, kita dibilang tidak konstitusional" ("Memfitnah Presiden Dalam Soal Apa?," 1993). Walaupun gagal menahan Petisi 50, Jenderal Yoga Sugama mengakui bahwa setelah keluar Pernyataan Keprihatinan, segala tindak tanduk dan gerakan Kelompok Petisi 50 dimonitor secara ketat oleh Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

Keinginan Laksamana Soedomo, Jenderal Yoga Sugama, dan Jaksa Agung Ali Said untuk menahan anggota Petisi 50 gagal karena tidak direstui oleh Jenderal M. Jusuf, namun bukan berarti penandatanganan Petisi 50 bebas melenggang. Secara diam-diam Petisi 50 diberi stigma negatif dan mulai diperlakukan secara tidak adil. Hal ini bermula dari keluarnya pernyataan-pernyataan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang menyudutkan dan mengucilkan Petisi 50. Pernyataan itu membuat takut masyarakat, sampai akhirnya terbentuklah citra bahwa Petisi 50 adalah *dissident* atau pembangkang negara yang harus dijauhi. Sebutan *dissident* berasal dari Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo. Sebutan *dissident* oleh banyak kalangan juga disebut terlalu terburu-buru

karena belum ada vonis dari pengadilan. Selain itu apa yang dilakukan Petisi 50 bukan sebuah pembangkangan melainkan hanya perbedaan pendapat.

Penyebutan *dissident* juga mendapat sorotan kala itu dari Afan Gaffar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Penyebutan itu berkonotasi negatif dan dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Pendapat hampir sama diungkap oleh Soerjadi, Ketua PDI dan Wakil Ketua MPR ("Suara-Suara Tentang Dissident," 1991). Tidak hanya cap sebagai *dissident*, pemerintah secara diam-diam memberlakukan tindakan otoriter dan represif kepada penandatangan Petisi 50. Tindakan represif diam-diam ini diberlakukan bahkan sebelum jawaban presiden atas pertanyaan 19 anggota DPR dikeluarkan. Tindakan pemerintah ini merupakan sinyal ketidaksukaan Soeharto pada Petisi 50. Dalam otobiografinya yang keluar 9 tahun kemudian setelah peristiwa Petisi 50, secara terbuka Soeharto memang menyinggung ketidaksukaannya pada Petisi 50. Sekali lagi ia menilai Petisi 50 bermaksud hendak menjatuhkan pemerintahannya. Dalam perumpamaan Jawa, Soeharto menyebut kelompok Petisi 50 sebagai orang yang *rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa* (Dwipayana, 1989).

Kelompok Petisi 50 menyangkan ucapan Presiden Soeharto dalam otobiografinya itu. Pernyataan Presiden Soeharto itu seolah-olah ingin memperjelas status Kelompok Petisi 50 sebagai kelompok pembangkang negara yang tidak menggunakan cara-cara yang sesuai. Padahal seperti diketahui semua protes yang dikeluarkan oleh Kelompok Petisi 50 dengan surat melalui DPR di bawah naungan lembaga yang sah secara hukum yaitu YLKB. Selain mengirim surat kepada DPR untuk meluruskan penilaian atas Petisi 50 itu, dikirim juga surat langsung kepada Presiden Soeharto. Surat Petisi 50 kepada DPR/MPR ingin menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Soeharto dalam otobiografinya adalah tidak benar. Surat tersebut secara panjang lebar menjelaskan bahwa cara-cara yang dilakukan Petisi 50 selama ini sudah benar legal formal dan tidak menyalahi hukum.

Tindakan represif yang dilakukan pemerintah secara diam-diam ini dinilai terlalu jauh, Bratanata menyebut tindakan itu sebagai *burgerlijke dood* atau kematian sipil (Bratanata, 1991). Kematian sipil atau pembatasan hak-hak sipil yang ditujukan kepada anggota Petisi 50 diantaranya seperti larangan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah dan tender dari pemerintah, tidak dapat memperbarui lisensi-lisensi dan ijin kerja proyek-proyek pemerintah yang mereka tangani, dikeluarkan bahkan diharuskan mengundurkan diri dari lingkungan pekerjaan mereka terutama yang menjadi staf pengajar Perguruan Tinggi atau yang bekerja di media massa.

Hukuman kepada Petisi 50 ini oleh Ali Sadikin dianggap melebihi hukuman yang diberikan kepada anggota PKI. Karena anggota PKI pada saat itu ditahan selama kurang lebih 8 tahun itupun dengan surat resmi dan diikat UU. Anehnya, Petisi 50 dimatikan hak-hak sipilnya tanpa surat resmi dan tidak ada UU yang mengatur ditambah batas waktunya tidak ditentukan secara jelas. Lebih parah lagi, hukuman lisan ini sangat dipatuhi. Hanya dengan kalimat "ada perintah dari atas" semua lembaga negara takut untuk meloloskan ijin yang berkaitan dengan Petisi 50. Kematian sipil yang menimpa anggota Petisi 50 diantaranya seperti pada Ali Sadikin yang terpaksa menutup perusahaannya PT. Arkalina karena kredit macet ("Pembangunan Fisik Ada, Politik Tidak," 1981).

Tidak hanya penandatangan Petisi 50, dua anggota FKS yang tidak ikut menandatangani Petisi 50 terkena dampaknya juga. Keduanya adalah H.R. Dharsono dan Achmad Soekendro. Dua purnawirawan ABRI yang juga getol mengkritik pemerintahan Soeharto. H.R. Dharsono dicopot dari kedudukannya sebagai Direktur PT. Propelat, perusahaan induk milik Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Achmad Soekendro harus mundur sebagai Presiden Direktur perusahaan induk milik negara yang menghimpun 39 perusahaan perdagangan dan industri. Bahkan 4 bulan sebelum disertasi yang ditulis Achmad Soekendro selesai, keluar surat yang menyatakan tugas akademiknya tidak lagi diizinkan.

Kematian sipil lainnya yang dibebankan kepada anggota Petisi 50 adalah saat Pemilihan Umum 1982. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud menjelaskan bahwa anggota Petisi 50 boleh mengikuti pemilu tapi harus melalui *screening* atau pemeriksaan yang ketat. Amir Machmud mengatakan hal ini setelah pertemuannya dengan Presiden Soeharto di Cendana saat membicarakan tanggal pelaksanaan pemilu. Pernyataan Amir Machmud banyak dibantah oleh

tokoh-tokoh politik baik dari PPP maupun PDI. Sejatinya, tidak ada UU yang melarang anggota Petisi 50 untuk menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Selain itu Petisi 50 juga bukan organisasi terlarang karena proses *screening* pada waktu itu hanya bisa diberlakukan kepada bekas anggota organisasi terlarang dan itupun sudah diatur dalam UU.

Begitu kuatnya tindakan represif yang diberlakukan kepada penandatanganan Petisi 50 sampai-sampai mematikan unsur ekonomi mereka. Namun pemerintah terus waspada karena kematian sipil itu tidak membuat Kelompok Petisi 50 menjadi jera, justru semakin kuat bersuara. Lagipula tindakan pemerintah ini semakin membenarkan apa yang dikritik oleh Petisi 50 bahwa Soeharto menggunakan ABRI sebagai alat pengaman kekuasaannya. Siapa saja yang menentang dirinya diartikan sebagai penentang Pancasila sehingga harus disingkirkan. Dan penyingkiran itu menggunakan ABRI yang seharusnya menjadi pengaman negara malah dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini memperkaya kajian sejarah khususnya kajian sejarah di masa Orde Baru. Informasi tentang kontrol politik dan represi sipil yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan jelas pernah dilakukan. Ini menjadi catatan sejarah yang penting bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Pidato presiden pada Rapat Pimpinan ABRI 27 Maret 1980 memiliki dampak yang cukup besar. Pemerintah menggunakan ABRI tidak lagi sebagai alat melindungi negara namun sudah dipakai untuk melindungi kekuasaan. Lahimya kelompok Petisi 50 yang sangat kuat mengkritik pemerintah bukanlah peristiwa yang tiba-tiba namun akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kritik yang disampaikan oleh para mantan perwira tinggi ABRI yang tergabung dalam Fosko pada tahun 1978 dianggap cukup mengganggu pemerintah. Belum lagi aksi *walk out* yang dilakukan oleh PPP dari unsur NU saat Sidang Umum MPR 1978 membahas P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Kritik yang bertubi-tubi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi suara Golkar dalam Pemilihan Umum 1982 sehingga Presiden Soeharto melakukan serangan balasan dengan memanfaatkan pidato kepresidenan.

Pidato presiden di Rapat Pimpinan ABRI justru menimbulkan masalah baru karena presiden dianggap telah menafsirkan Pancasila secara keliru. Bagi mereka, Presiden Soeharto menggunakan ideologi negara untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Selain itu mereka juga kecewa pada pernyataan Presiden Soeharto yang meminta agar ABRI berpihak pada salah satu partai dan memilih kawan atau lawan atas dasar penilaian sepihak darinya. Pidato Presiden Soeharto itu seolah-olah untuk menegaskan siapa saja yang menjadi lawan politiknya adalah golongan anti Pancasila. Semakin terlihat nyata dengan adanya *Burgerlijke dood* atau kematian sipil, *dissident* atau pembangkang negara, dan proses *screening* saat pemilihan umum yang diberlakukan pemerintah kepada para penandatanganan Petisi 50.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat Tambahan Presiden (1980, April 8). *Kompas*.
Berpetisi Tanpa Caci Maki. (2008, July 20). *Tempo*.
Bratanata, S. (1991). *Catatan Sejarah Sekedar Mata Rantai Perjuangan Rakyat*. Badan Pengkajian Masyarakat pada YLKB.
Bukan Kelompok Sehidup Semati. (1991, July 13). *Tempo*.
Dwipayana, G. & R. K. H. (1989). *Soeharto: Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya*. PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
Hakim, L. (1993). *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan (Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H)*. Media Dakwah.

- Jazimah, I. (2013). MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 3(1), 9–34.
- Jenkins, D. (2010). *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Komunitas Bambu.
- Kecewa Terhadap Pelaksanaan Orba. (1994, February 5). *Tempo*.
- Lahirnya Petisi 50. (1994, February 5). *Tempo*.
- Memfitnah Presiden dalam Soal Apa? (1993, July 8). *Forum Keadilan*.
- Nugroho, A. S. (2025). The Role of the Indonesian Military in Early Independence: Nationalist and Socialist-Communist Views. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 81–88. <https://doi.org/10.30595/jssh.v9i1.25896>
- Pembangunan Fisik Ada, Politik Tidak. (1981, February 15). *Dewan Masyarakat*.
- Presiden Suharto: ABRI Agar (1980, July 13). *Kompas*.
- Priyadi, S. (2021). *Metode Penelitian Sejarah*. Pustaka Pelajar.
- Suara-Suara tentang Dissident. (1991, May 18). *Tempo*.
- Tim Penulis YLKB. (1991). *Melihat Kembali Pernyataan Keprihatinan-5 Mei 1980 dalam Seri Mencerdaskan Kehidupan Bangsa No. 7*. Badan Pengkajian Masyarakat pada YLKB.
- Ucapan Presiden Merupakan Peringatan. (1980, April 25). *Berita Buana*.